

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan penyusunannya, dimana penyusunannya lebih banyak mengacu kepada regulasi yang berlaku dan konsep-konsep yang bisa dipertanggungjawabkan.

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Good governance seringkali diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan *public good service*. Hal mana yang dirasakan oleh masyarakat sangat dinantikan untuk lebih optimal lagi adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Tahun 2024 yang kami susun ini merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Renstra Bappeda tahun 2024 – 2026 dimana tahun 2024 telah memasuki tahun kelima pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama unsur pimpinan beserta Staf di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut, dan pihak-pihak lainnya yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya dari pihak-pihak yang terlibat diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itulah sumbangan saran, masukan, dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pihak manapun juga, baik individu maupun kelompok.

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, ini bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja secara khusus.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pelaihari, Januari 2025

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**ISMAIL FAHMI, SE, MT.**  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 19731128 199803 1 008

# DAFTAR ISI

|                                                                         | Hal              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                    | i                |
| DAFTAR ISI .....                                                        | iv               |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                   | vi               |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>I-1</b>       |
| 1. Latar Belakang .....                                                 | I-1              |
| 2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Tanah Laut .....                     | I-3              |
| a. Struktur Organisasi .....                                            | I-3              |
| b. Kepegawaian .....                                                    | I-4              |
| c. Kondisi Sarana dan Prasarana yg digunakan .....                      | I-7              |
| d. Data Statistik .....                                                 | I-9              |
| e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah .....                     | I-9              |
| <br><b>BAB II    PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....</b>          | <br><b>II-1</b>  |
| 1. Urusan Wajib .....                                                   | II-1             |
| 2. Urusan Pilihan .....                                                 | II-1             |
| 3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....                    | II-1             |
| 4. Urusan Pemerintahan Umum .....                                       | II-19            |
| <br><b>BAB III    PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>            | <br><b>III-1</b> |
| 1. Tugas Pembantuan yg diterima dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi ... | III-1            |
| 2. Tugas Pembantuan yang diberikan .....                                | III-1            |
| <br><b>BAB IV    PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....</b>      | <br><b>IV-1</b>  |
| 1. Kerjasama Daerah .....                                               | IV-1             |
| 2. Koordinasi denganInstansi Vertikal di Daerah .....                   | IV-1             |
| 3. Pengelolaan Kawasan Khusus .....                                     | IV-1             |
| 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....                          | IV-1             |
| 5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....                | IV-1             |

|              |                                            |            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP .....</b>                       | <b>V-1</b> |
|              | 1. Kesimpulan.....                         | V-1        |
|              | 2. Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan..... | V-2        |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda

Lampiran 2. Rekap Belanja Langsung

Lampiran 3. Laporan Kinerja

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sosial Budaya.
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan .
- f. Bidang Perencanaan Makro.
- g. UPT Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Riwayat singkat perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam perjalanan selama beberapa kurun waktu Bappeda sebagai instansi Pemerintah Daerah telah memberikan andil yang cukup besar dalam membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum otonomi daerah diberlakukan fungsi dan peran Bappeda kemungkinan tidak seberat sekarang ini, mengingat keterbatasan regulasi dari beberapa konsep yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak mengakomodir sistem perencanaan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak jarang kendala-kendala yang sering dihadapi bagi daerah. Kreasi dan inovasi daerah tidak selalu mendapat dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat. Segala regulasi dan konsep-konsep

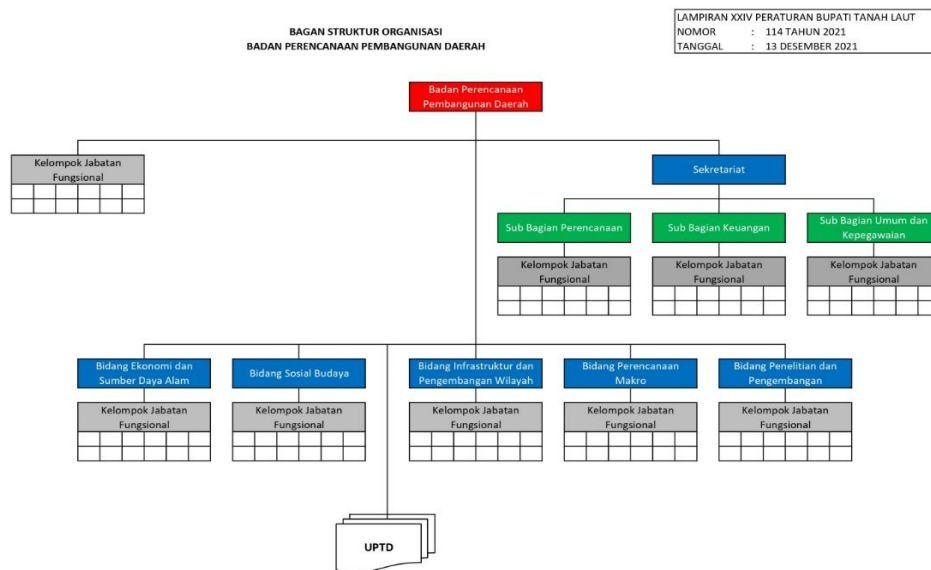
perencanaan lebih mengedapankan perencanaan yang bersifat Button Up semata.

Di era otonomi Daerah dan reformasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan Instansi yang sangat strategis dalam membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Bappeda telah banyak menghasilkan beberapa dokumen-dokumen penting bagi perencanaan-perencanaan di daerah dan berusaha terus untuk memformulasikan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Beban kinerja Bappeda untuk saat ini, dari tahun ketahun dirasakan cukup berat dalam mengawal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam batas kurun waktu yang telah ditetapkan.

## **2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Tanah Laut**

### **a. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Tanah laut, berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.



## b. Kepegawaian

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari :

|    |                             |   |       |
|----|-----------------------------|---|-------|
| 1. | Kepala Bappeda              | 1 | Orang |
| 2. | Sekretaris Bappeda          | 1 | Orang |
| 3. | Kepala Bidang               | 5 | Orang |
| 4. | Kepala Sub Bagian           | 3 | Orang |
| 5. | Fungsional Perencana        | 6 | Orang |
| 6. | Fungsional Peneliti         | 2 | Orang |
| 7. | Fungsional Pranata Komputer | 3 | Orang |
| 8. | PPPK                        | 4 | Orang |
| 9. | Staf/Pelaksana              | 6 | Orang |

|  |        |    |       |
|--|--------|----|-------|
|  | Jumlah | 31 | Orang |
|--|--------|----|-------|

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

| No | Pendidikan | Status Kepegawaian |      | Jumlah |
|----|------------|--------------------|------|--------|
|    |            | PNS                | PPPK |        |
| 1. | SD         | 0                  | 0    | 0      |
| 2. | SMP        | 0                  | 0    | 0      |
| 3. | SMA        | 2                  | 0    | 2      |
| 4. | D3         | 3                  | 0    | 3      |
| 5. | S1         | 16                 | 4    | 19     |
| 6. | S2         | 6                  | 0    | 6      |
|    | Jumlah     | 27                 | 4    | 31     |

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Pangkat            | Golongan | Jumlah   |
|----|--------------------|----------|----------|
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c     | 1 Orang  |
| 2. | Pembina TK. I      | IV/b     | 2 Orang  |
| 3. | Pembina            | IV/a     | 4 Orang  |
| 4. | Penata TK. I       | III/d    | 6 Orang  |
| 5. | Penata             | III/c    | 4 Orang  |
| 6. | Penata Muda TK. I  | III/b    | 3 Orang  |
| 7. | Penata Muda        | III/a    | 5 Orang  |
| 8. | Pengatur TK. I     | II/d     | 3 Orang  |
| 9. | Perencana Pertama  | X        | 4 Orang  |
|    | Jumlah             | -        | 31 Orang |

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Bappeda Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Jabatan                             | Struktural | Fungsional |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Kepala Bappeda                      | 1 Orang    | -          |
| 2. | Sekretaris Bappeda                  | 1 Orang    | -          |
| 3. | Kepala Bidang                       | 5 Orang    | -          |
| 4. | Kepala Sub Bagian                   | 3 Orang    | -          |
| 5. | Pejabat Fungsional Perencana        | -          | 6 Orang    |
| 6. | Pejabat Fungsional Peneliti         | -          | 2 Prang    |
| 7. | Pejabat fungsional Pranata Komputer |            | 3 orang    |
|    | Jumlah                              | 10 orang   | 11 orang   |

c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

**Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2023**

| No<br>. | Jenis Barang>Nama Barang | Jumlah Barang       | Keadaan Barang |    |    |
|---------|--------------------------|---------------------|----------------|----|----|
|         |                          |                     | B              | KB | RB |
| 1       | 2                        | 3                   | 4              | 5  | 6  |
| 1.      | Tanah                    | 6753 M <sup>2</sup> | B              |    |    |
| 2.      | Gedung                   | 651 M <sup>2</sup>  | 13             |    |    |
| 3.      | Kendaraan Roda 2         | 13 Buah             | 4              |    |    |
| 4.      | Kendaraan Roda 4         | 4 Buah              | 7              |    |    |
| 5.      | GPS                      | 7 Buah              | 1              |    |    |
| 6.      | Mesin Ketik Manual       | 1 Buah              | 12             |    |    |
| 7.      | Lemari Besi              | 12 Buah             | 11             |    |    |
| 8.      | Rak Besi/Metal           | 11 Buah             | 18             |    |    |
| 9.      | Filling Besi/Metal       | 18 Buah             | 1              |    |    |
| 10.     | Brand Kas                | 1 Buah              | 21             |    |    |
| 11.     | Lemari Kayu              | 21 Buah             | 1              |    |    |
| 12.     | Papan Visuil             | 1 Buah              | 6              |    |    |
| 13.     | Alat Penghancur Kertas   | 6 Buah              | 1              |    |    |
| 14.     | Papan Pengumuman         | 1 Buah              | 1              |    |    |
| 15.     | White Board              | 1 Buah              | 2              |    |    |
| 16.     | Genset                   | 2 Buah              | 7              |    |    |
| 17.     | Rak Kayu                 | 7 Buah              | 56             |    |    |
| 18.     | Meja Kayu                | 56 Buah             | 2              |    |    |
| 19.     | Kursi Besi/Metal         | 2 Buah              | 40             |    |    |
| 20.     | Meja Rapat               | 40 Buah             | 1              |    |    |
| 21.     | Meja Podium              | 1 Buah              | 33             |    |    |
| 22.     | Kursi Rapat              | 33 Buah             | 2              |    |    |
| 23.     | Kursi Tamu               | 2 Set               | 107            |    |    |
| 24.     | Kursi Putar              | 107 Buah            | 21             |    |    |

| No<br>. | Jenis Barang>Nama Barang              | Jumlah Barang | Keadaan Barang |    |    |
|---------|---------------------------------------|---------------|----------------|----|----|
|         |                                       |               | B              | KB | RB |
| 1       | 2                                     | 3             | 4              | 5  | 6  |
| 25.     | Meja Komputer                         | 21 Buah       | 5              |    |    |
| 26.     | Kursi Kerja                           | 5 Buah        | 1              |    |    |
| 27.     | Rak TV                                | 1 Buah        | 12             |    |    |
| 28.     | Karpet                                | 12 Meter      | 2              |    |    |
| 29.     | Meja Kerja                            | 2 Buah        | 1              |    |    |
| 30.     | Mesin Potong Rumput                   | 1 Buah        | 1              |    |    |
| 31.     | Lemari es                             | 1 Buah        | 8              |    |    |
| 32.     | AC Unit                               | 8 Buah        | 22             |    |    |
| 33.     | AC Split                              | 22 Buah       | 2              |    |    |
| 34.     | Televisi                              | 2 Buah        | 1              |    |    |
| 35.     | Wireless                              | 1 Buah        | 3              |    |    |
| 36.     | Microphone Table Stand                | 3 Set         | 1              |    |    |
| 37.     | Camera Film                           | 1 Buah        | 5              |    |    |
| 38.     | Handy Cam                             | 5 Buah        | 1              |    |    |
| 39.     | Tandon Air                            | 1 Buah        | 2              |    |    |
| 40.     | Tong Sampah                           | 2 Buah        | 2              |    |    |
| 41.     | Mainframe                             | 2 Buah        | 28             |    |    |
| 42.     | P.C Unit/ Komputer PC                 | 28 Unit       | 14             |    |    |
| 43.     | Laptop                                | 14 Buah       | 21             |    |    |
| 44.     | Notebook                              | 21 Buah       | 44             |    |    |
| 45.     | Printer                               | 44 Buah       | 7              |    |    |
| 46.     | Scanner                               | 7 Buah        | 1              |    |    |
| 47.     | Ipad                                  | 1 Buah        | 7              |    |    |
| 48.     | Monitor                               | 7 Buah        | 1              |    |    |
| 49.     | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | 1 Buah        | 13             |    |    |
| 50.     | UPS                                   | 13 Buah       | 2              |    |    |
| 51.     | Stabilizer/ Stavolt                   | 2 Buah        | 6              |    |    |
| 52.     | Harddisk Internal                     | 6 Buah        | 35             |    |    |
| 53.     | Harddisk Eksternal                    | 35 Buah       | 2              |    |    |
| 54.     | DVD-Rom Drive                         | 2 Buah        | 1              |    |    |
| 55.     | Memory                                | 1 Buah        | 1              |    |    |

| No<br>. | Jenis Barang>Nama Barang          | Jumlah Barang | Keadaan Barang |    |    |
|---------|-----------------------------------|---------------|----------------|----|----|
|         |                                   |               | B              | KB | RB |
| 1       | 2                                 | 3             | 4              | 5  | 6  |
| 56.     | Server                            | 1 Unit        | 5              |    |    |
| 57.     | Router                            | 5 Buah        | 7              |    |    |
| 58.     | Proyektor + Attachment            | 7 Buah        | 1              |    |    |
| 59.     | Audio Amplifier                   | 1 Buah        | 1              |    |    |
| 60.     | Microphone/Wireless Mic           | 1 Unit        | 5              |    |    |
| 61.     | Layar Proyektor                   | 5 Buah        | 2              |    |    |
| 62.     | Loudspeaker                       | 2 unit        | 2              |    |    |
| 63.     | Mixer Amplifier                   | 2 Unit        | 2              |    |    |
| 64.     | Voice Recorder                    | 2 Buah        | 4              |    |    |
| 65.     | Camera Electronic                 | 4 Buah        | 1              |    |    |
| 66.     | Kompas                            | 1 Buah        | 4              |    |    |
| 67.     | Handy Talky                       | 4 Buah        | 3              |    |    |
| 68.     | Wireless Portable (Sound System)  | 3 Unit        | 9              |    |    |
| 69.     | CCTV                              | 9 Buah        | 2              |    |    |
| 70.     | Gerobak Dorong                    | 2 Buah        | 28             |    |    |
| 71.     | Kursi Lipat                       | 28 Buah       | 1              |    |    |
| 72.     | Tangga Alumunium                  | 1 Buah        | 1              |    |    |
| 73.     | Peralatan Jaringan Lain-lain      | 1 Set         | 1              |    |    |
| 74.     | automatic Volatge Regulator (AVR) | 1 Buah        | 1              |    |    |
| 75.     | Tripod Camera                     | 1 Buah        | 1              |    |    |

d. Data Statistik

*Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.*

e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

*Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.*

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **1. Urusan Wajib**

*SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud*

#### **2. Urusan Pilihan**

*SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud*

#### **3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dengan Renja)

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun anggaran 2024 sudah sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda 2024-2026.

- b. Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2024 meliputi :

1. Program, yaitu sebanyak 4 (Empat) yang menjadi arah dasar, sasaran dalam proses perencanaan kegiatan.
2. Kegiatan, yaitu sebanyak 16 (Enam Belas) kegiatan sesuai dengan kapasitas tupoksi keperluan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
3. Sub Kegiatan, yaitu sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan yang merupakan turunan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

- c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024, dengan jumlah pagu murni sebesar Rp. 13.924.803.679,- dan setelah berjalannya waktu ada perubahan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 14.667.321.898,-. Dari total

pagu belanja operasional tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 13.867.741.743,- terealisasi sebesar Rp. 12.588.997.456,-, dengan capaian realisasi keuangan pada seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebesar 90.78 % dan Belanja Modal Rp. 799.580.155,- terealisasi sebesar Rp. 717.840.216 dengan capaian realisasi 89.78%. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh institusi Bappeda Kabupaten Tanah Laut dengan capaian, target dan sasaran dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan untuk pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik persentasenya sebesar 100 %. Adapun disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

| No | Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan                                      | Anggaran (Rp)          | Realisasi               | Target (%) | Realisasi (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1. | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>11.663.209.560-</b> | <b>10.984.592.636,-</b> | <b>100</b> | <b>94.18</b>  |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>38.692.889,-</b>    | <b>35.107.100,-</b>     | <b>100</b> | <b>90.73</b>  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 7.892.957,-            | 6.404.900,-             | 100        | 81.15         |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 30.799.932,-           | 28.702.200,-            | 100        | 93.19         |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>7.294.357.285,-</b> | <b>6.846.755.132,-</b>  | <b>100</b> | <b>93.86</b>  |

|  |                                                                  |                        |                        |            |              |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 7.286.357.690,-        | 6.839.504.632,-        | 100        | 93.87        |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 7.999.595,-            | 7.250.500,-            | 100        | 90.64        |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>118.200.000,-</b>   | <b>115.910.000,-</b>   | <b>100</b> | <b>98.06</b> |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya           | 22.200.000,-           | 20.000.000,-           | 100        | 90.09        |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 96.000.000,-           | 95.910.000,-           | 100        | 99.91        |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>3.425.397.647,-</b> | <b>3.291.907.105,-</b> | <b>100</b> | <b>96.10</b> |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.983.424,-           | 18.413.220,-           | 100        | 87.75        |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 842.081.899,-          | 743.786.193,-          | 100        | 88.33        |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 21.757.954,-           | 17.557.100,-           | 100        | 80.69        |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 59.975.961,-           | 46.625.200,-           | 100        | 77.74        |
|  | Penyediaan Bahan                                                 | 3.000.000,-            | 3.000.000,-            | 100        | 100.00       |

|                                                                                       |                      |                      |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                               |                      |                      |            |              |
| Penyediaan Bahan/Material                                                             | 15.000.000,-         | 15.000.000,-         | 100        | 100.00       |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 2.461.600.217,-      | 2.446.609.387,-      | 100        | 99.39        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 998.192,-            | 916.000,-            | 100        | 91.77        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>442.241.739,-</b> | <b>378.666.585,-</b> | <b>100</b> | <b>85.62</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 117.000.000,-        | 66.752.942,-         | 100        | 57.05        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 325.241.739,-        | 311.913.643,-        | 100        | 95.90        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>344.320.000,-</b> | <b>316.246.714,-</b> | <b>100</b> | <b>91.85</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | 37.000.000,-         | 36.814.700,-         | 100        | 99.50        |

|    |                                                                                                                  |                 |               |     |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|--------|
|    | atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                     |                 |               |     |        |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 93.200.000,-    | 89.628.050,-  | 100 | 96.17  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 64.300.000,-    | 56.340.000,-  | 100 | 87.62  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 149.820.000,-   | 133.463.964,- | 100 | 89.08  |
| 2. | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                         | 1.516.565.501,- | 932.999.070,- | 100 | 61.52  |
|    | <b>Penyusunan perencanaan dan pendanaan</b>                                                                      | 1.289.885.501,- | 733.064.070,- | 100 | 56.83  |
|    | Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota                        | 1.289.885.501,- | 733.064.070,- | 100 | 56.83  |
|    | <b>Analisis data dan</b>                                                                                         | 93.500.000,-    | 93.500.000,-  | 100 | 100.00 |

|    |                                                                                    |               |               |     |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|--------|
|    | <b>informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</b>         |               |               |     |        |
|    | Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah                         | 93.500.000,-  | 93.500.000,-  | 100 | 100.00 |
| 1  | <b>Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</b>  | 133.180.000,- | 106.435.000,- | 100 | 79.92  |
|    | Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | 133.180.000,- | 106.435.000,- | 100 | 79.92  |
| 3. | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>          | 804.710.118,- | 739.680.466,- | 100 | 91.92  |
|    | <b>Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>          | 410.918.604,- | 409.137.666,- | 100 | 99.57  |

|  |                                                                                                                            |               |               |     |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|-------|
|  | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)                    | 7.999.114,-   | 7.666.980,-   | 100 | 95.85 |
|  | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan        | 12.427.342,-  | 12.409.142,-  | 100 | 99.85 |
|  | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)             | 354.142.260,- | 353.007.940,- | 100 | 99.68 |
|  | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia | 36.349.888,-  | 36.053.604,-  | 100 | 99.18 |

|  |                                                                                                                     |              |              |     |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-------|
|  | <b>Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                        | 77.434.083,- | 75.090.600,- | 100 | 96.97 |
|  | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)              | 42.995.598,- | 42.988.400,- | 100 | 99.98 |
|  | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian | 15.458.495,- | 15.455.000,- | 100 | 99.98 |
|  | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)                       | 7.981.990,-  | 5.650.000,-  | 100 | 70.78 |
|  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen                                                              | 10.998.000,- | 10.997.200,- | 100 | 99.99 |

|  |                                                                                                                                           |               |               |     |       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|-------|
|  | Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang SDA                                                                              |               |               |     |       |
|  | <b>Koordinasi<br/>perencanaan<br/>bidang infrastruktur<br/>dan kewilayahan</b>                                                            | 316.357.431,- | 255.452.200,- | 100 | 80.75 |
|  | Koordinasi<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah bidang<br>infrastruktur (RPJPD,<br>RPJMD & RKPD)              | 21.499.053,-  | 20.274.000,-  | 100 | 94.30 |
|  | Pelaksanaan<br>monitoring dan<br>evaluasi penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>perangkat daerah<br>bidang infrastruktur | 18.568.278,-  | 18.490.000,-  | 100 | 99.58 |
|  | Koordinasi<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah bidang<br>kewilayahan<br>(RPJPD, RPJMD &<br>RKPD)             | 237.550.000,- | 198.728.200,- | 100 | 83.66 |
|  | Pelaksanaan<br>monitoring dan<br>evaluasi penyusunan                                                                                      | 38.740.100,-  | 17.960.000,-  | 100 | 46.36 |

|                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>perangkat daerah<br>bidang kewilayahan |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

1. Belanja Operasi :

Belanja Pegawai ..... Rp. 7.288.357.690,-  
 Belanja Barang dan Jasa ..... Rp. 6.581.384.053,-  
 Jumlah..... **Rp. 13.867.741.743,-**

2. Belanja Modal :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ... Rp. 799.580.155,-  
 Jumlah ..... **Rp. 799.580.155,-**

Bappeda kabupaten tanah laut telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan dpa-skpd tahun anggaran 2024, pada APBD tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 13.924.803.679,- dan mengalami perubahan pada DPPA-SKPD di APBD-Perubahan tahun anggaran 2024 menjadi RP. 14.667.321.898,- yang artinya ada penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 742.518.219,-.

d. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan dalam suatu instansi tentu tidak akan lepas dari permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan yang di hadapi oleh bappeda dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan perencanaan pembangunan sub bidang SDA, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif anggaran Rp.**18.979.990,-** realisasi fisik 100% dan keuangan **87.71%**.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten tanah laut tahun 2024 (data tahun terakhir bps) adalah sebesar 5,01 persen. dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,78 persen, artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Terkait dengan kemiskinan, pada tahun 2023 berada pada angka 3,73% dibawah angka nasional yaitu 9,36 % dan propinsi kalimantan selatan 4,29 %. kemudian di tahun 2024 pada angka 3,74% dibawah propinsi sebesar 4,11 % dan nasional 9,03%. nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.

Tahun 2024 angka kemiskinan kab tanah laut sebesar 3,74 % , lebih rendah dibandingkan provinsi kalimantan selatan sebesar 4,29 %, artinya tren positif dengan jumlah masih dibawah rata-rata provinsi kalimantan selatan, atau peringkat ke tiga kemiskinan terendah.

Di sisi kesenjangan pendapatan penduduk, gini ratio di kabupaten tanah laut menunjukan hal yang positif. berdasarkan data bps pada tahun 2024 gini ratio kabupaten tanah laut berada pada angka 0,257. angka ini menurun di bandingkan dengan tahun 2023 yang berada pada angka 0,259.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi dilaksanakan kegiatan pasar murah pada tahun 2024 sudah dilakukan sebanyak 24 kali yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Beberapa sektor yang dapat menjadi prioritas di kabupaten tanah laut pada masa mendatang adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan pariwisata. pengembangan sektor tersebut sangat potensial mengingat kontribusi sangat besar terhadap perekonomian, ketiga sektor tersebut diharapkan menjadi skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut.

Pada sektor ketenagakerjaan, peluang dan tantangan ke depan semakin kompleks. dapat disampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (tpt) berdasarkan data bps, di kabupaten tanah laut pada 2023, 4,17% kemudian tahun 2024 sebesar 3,58%, artinya mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran menurun. tetapi angka ini lebih rendah dari provinsi kalimantan selatan pada tahun 2023 sebesar 4,74%, dan tahun 2024 sebesar 4,31 %.

Pada program pelatihan tenaga kerja “siap kerja” minimal 500 orang pertahun, telah berjalan dan telah memenuhi dan bahkan melampaui target yang dicanangkan.

Isi kegiatan perencanaan pembangunan sub bidang SDA, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif diantaranya :

a. Kajian peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi UMKM, pariwisata, pertanian, dan perikanan di desa pandahan dan desa banyu irang kecamatan bati-bati tahun 2023 dan dilanjutkan di tahun 2024.

b. Kajian Permasalahan Irigasi dan Sawah di Lokserapang Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Permasalahan ;

a. Belum adanya sinergitas antar SKPD dalam pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah, melalui perencanaan zonasi kewilayaan.

b. Belum tertanganinya keterkaitan irigasi dengan persawahan pada Desa Lokserapang Pelaihari.

Solusi ;

a. Perlu menyusun kajian peningkatan perekonomian Masyarakat melalui pemanfaatan potensi UMKM, Pariwisata, Pertanian dan Perikanan.

b. Perlu perbaikan yang serius terhadap Irigasi dan Persawahan pada Lokserapang Pelaihari kepada SKPD yang terkait.

Isi kegiatan ini diantaranya adalah Fasilitasi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian. Fasilitasi rapat pemantauan dan dukungan percepatan penyediaan PSN yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. FGD Pengelolaan lahan rawa untuk pertanian di Kabupaten Tanah Laut. Rapat koordinasi dan evaluasi program YESS di Kabupaten Tanah Laut. Fasilitasi kunjungan dan wawancara

dalam rangka pengumpulan informasi lapangan kegiatan *metropolitan statistic area* bidang *small area estimation 2024*. *Focus Group Discussion* Analisa kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Rapat Monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Terdapat total luas lahan rawa pertanian 40,459 Ha di Kabupaten Tanah Laut yang potensial belum dikembangkan karena berbagai permasalahan lahan rawa seperti produktivitas hasil lebih rendah dibanding hasil yang ditanam di daerah yang bukan rawa, pengelolaan air yang terbilang susah dimana pada saat hujan akan terjadi banjir dan saat kemarau terjadi kekeringan

Belum optimalnya SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA dalam menyampaikan laporan kinerjanya, baik melalui aplikasi e monev maupun secara hardcopy

2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Jumlah anggaran Rp. 276.290.100,- realisasi fisik 100 %, realisasi 78.43 %. Untuk kegiatan monitoring evaluasi perencanaan dan pengukuran pada kegiatan pokja Infrastruktur Pengembangan Wilayah.

Untuk Sektor Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur. Capaian Sampai Dengan Tahun 2024 Antara Lain :

1. Penerangan jalan umum sampai oktober 2024 sudah terpasang se kabupaten tanah laut sebanyak 14.564 titik. tahun 2023 sudah terpasang sebanyak 13.864 titik.
2. Program bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu di kabupaten tanah laut pada tahun 2024 sebanyak 325 unit rumah. tahun 2023 sebanyak 499 unit
3. Kebersihan Dan Penanganan Limbah Diantaranya:
  - Pelayanan pengangkutan sampah pilahan rumah tangga setiap kecamatan, adanya pembinaan dan pengambilan di Bank Sampah Setiap Kecamatan;

- Pengurangan penggunaan plastik untuk retail, telah telaksana program pengurangan plastik di semua retail se Kabupaten Tanah Laut;
  - Pelayanan kebersihan se kota pelaihari, melaksanakan kegiatan kebersihan setiap hari, seperti sapu jalan sepanjang protokol perkotaan, pengangkutan sampah berupa sampah rumah tangga, pembersihan saluran air hujan (parit), potong rumput se kota pelaihari, pengambilan sampah dijalur ke arah luar kota (seving), dan letakkan kontainer serta petugas untuk membersihkan;
  - Terdapat 3 halte sampah, 2 dari dana tanggung jawab sosial lingkungan (tjssl), 1 dari pt. arutmin yang terletak di terminal tanah habang, 1 dari pt. cpka terletak di jalan jl. a. syairani dan 1 dari dana apbd yang terletak di depan kantor DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut;
  - Menggalakkan Peran Serta Masyarakat Dan Menghidupkan Kembali TPS 3R.
4. Pada program peningkatan/pengaspalan minimal 85% jalan kabupaten yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, saat ini jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 69,64% atau sepanjang 1.272,07 km. program ini juga didukung melalui layanan pengaduan masyarakat dengan nama “Boc” (Bina Marga On Call).
  5. Dalam rangka penataan kota, kabupaten tanah laut telah menyusun rencana detail tata ruang, adapun yang telah memiliki peraturan bupati tetang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah kecamatan pelaihari, kecamatan takisung, kecamatan bati-bati, perkotaan jorong, sekitar kawasan industri jorong. sedangkan yang masih proses linsek kementrian ada 2 kecamatan yaitu kecamatan panyipatan dan tambang ulang, dan proses penyusunan materi teknis ada 2 yaitu kecamatan kurau dan bumi makmur.

6. Program PTSL (*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*) yang dilaksanakan bersama atr/bpn, pada tahun 2024 telah terlaksana sebanyak 8.723 sertifikat. lahan eks transmigrasi tercapai 173 sertifikat melalui program kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah eks transmigrasi tanah laut (kijang mas tala) yang didukung dengan aplikasi ISDN.
7. Terkait kawasan industri jorong pada tahun 2024 dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten tanah laut telah menyusun dokumen deliniasi kawasan industri jorong.

Permasalahan/kendala :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak maksimal dikarenakan SKPD kurang memberikan data yang tepat pada lokasi kegiatannya
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam perpartisipasi menjaga, merawat dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun

Solusi :

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terjadwal per triwulan
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas negara melalui pelibatan Masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

### 3. Kegiatan Penyusunan RKPD

Kegiatan penyusunan RKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda untuk melakukan perencanaan lingkup kabupaten Tanah Laut.

Anggaran Rp. 1.289.885.501,- realisasi fisik 100%, keuangan 56.83%

Perencanaan yang dilakukan sesuai permendagri 86 Tahun 2017 dimulai dengan membuat :

- Rancangan Awal RKPD yang disertai dengan proyeksi anggaran
- Musrenbang Kecamatan
- Forum Konsultasi Publik
- Forum SKPD
- Musrenbang RKPD
- Rancangan Akhir RKPD

Dalam proses penyusunan ini bersama Tim RKPD, melalui pokja bidang masing-masing melakukan proses dan verifikasi terhadap renja SKPD sehingga program dan kegiatan prioritas dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan :

Masalah yang sering muncul adalah karena proses perencanaan ini memerlukan waktu sehingga keterlambatan dalam pengumpulan dokumen atau bahan yang diminta Bappeda tidak sesuai jadwal.

Solusi :

Selalu melakukan komunikasi secara kontinyu terhadap kasubbag perencanaan SKPD

4. Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Anggaran Rp. 133.180.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 79,92%

- menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi RKPD / APBD tahun 2024
- Melakukan Upgrade aplikasi e.monev menjadi si monev untuk meningkatkan melaksanakan evaluasi dan monitoring perencanaan dan pengukuran.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui sistem aplikasi e monev
- melaksanakan monev pelaksanaan program dan kegiatan ke lapangan

- rapat internal lingkup Bappeda yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan DAK maupun pengusulan DAK
- fasilitasi evaluasi dan perencanaan serta pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK
- melaksanakan penyusunan laporan dana DAK

Permasalahan :

- suptansi capaian kegiatan tersebut sudah terpenuhi, karena banyak rapat – rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi pembangunan banyak dilaksanakan bagian tata pemerintahan melalui coffee morning
- Kurang tepat waktu SKPD memberikan hasil laporan yang diminta.

Solusi :

- Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing.
- Dapat mengatur batas waktu pengumpulan laporan pekerjaan sehingga dapat terpenuhi laporan yang direkap.

#### 5. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Anggaran Rp. 410.918.604,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.57%

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong , kecamatan Kintap. Dalam hal ini untuk mengetahui kegiatan di Kecamatan yang berkaitan dengan kemiskinan.

- Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dilaksanakan 3 kali rapat yaitu rapat pertama tentang Progres Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, rapat ke dua tentang sinkronisasi rencana program penanggulangan kemiskinan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (1 Dokumen). LP2KD ini di buat untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tanah Laut selama ini, serta menjelaskan kinerja TKPKD dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan :

1. Tidak terealisasinya rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan ke 2 karena terkendala waktu pelaksanaan dan regulasi serta data pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang belum didapatkan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Koordinasi antar SKPD untuk penanggulangan kemiskinan belum optimal dikarenakan belum terpetakan secara program maupun kegiatan yang beririsan antar SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah (*crosscutting* dan *cascading*)
3. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan di realisasikan anggaran sesuai kebutuhan saja, namun Monitorng dan evaluasi di 11 Kecamatan tetap dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Sosial dan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik dalam Kabupaten maupun dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Solusi :

1. Mengatur ulang jadwal Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tanah Laut yang sudah didapatkan dari Satuan Tugas Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan guna mensinergikan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Mengidentifikasi, mengevaluasi program/kegiatan dan indikator yang dilaksanakan SKPD terkait serta mengintegrasikan program/kegiatan tersebut terhadap lokus sasaran kemiskinan, SKPD cenderung hanya melaksanakan program/kegiatan guna memenuhi target penyelesaian pekerjaan SKPD saja tanpa memperhatikan/menyelaraskan pada sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD serta kebijakan dan Program pemerintah pusat sehingga impact yang dihasilkan dari program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak akan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan daerah.
3. Mengagendakan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup bidang sosial budaya untuk SKPD yang kegiatannya berupa pekerjaan non fisik dan meminta laporan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan serta meningkatkan komunikasi, koordinasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik. Kepada SKPD dan pihak terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.

#### **4. Urusan Pemerintahan Umum**

*SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud*

## BAB III

### PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### 1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah/Pemerintah

##### Provinsi

*“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”*

#### 2. Tugas Pembantuan yang diberikan

*“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”*

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **1. Kerjasama Daerah**

***“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”***

#### **2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

***“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”***

#### **3. Pengelolaan Kawasan Khusus**

***“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”***

#### **4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

***“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”***

#### **5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

***“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”***

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan khususnya SKPD Bappeda, alokasi anggaran belanja Bappeda tahun anggaran 2024 pada APBD Murni sebesar Rp. 13.924.803.679,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 14.667.321.898,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.306.837.672,- dengan realisasi keuangan 90.72 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Sasaran Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

## **2. Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan**

Pada tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Terbaik II.

Pada tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Terbaik II.

Pada tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Katagori Terbaik III

Pada tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022 dalam katagori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi peringkat 4 Nasional.

Pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 dalam katagori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi peringkat 10 Nasional

Pelaihari, Januari 2025

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**ISMAIL FAHMI, SE, MT.**  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 19731128 199803 1 008